

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Hazan dan Rahat melihat rekrutmen politik dari empat aspek yaitu siapa kandidat yang dinominasikan, siapa yang menyeleksi, dimana kandidat diseleksi dan bagaimana kandidat diputuskan. Melihat dari keseluruhan rekrutmen politik partai PKN pada pemilihan legislatif 2024 di Kota Padang ini, memiliki kelebihan dan kekurangan dalam setiap poin rekrutmen politik. Dari penjelasan yang telah peneliti jelaskan melalui data sekunder dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa partai PKN tidak melaksanakan rekrutmen politik dengan baik, jika dilihat dari empat aspek yang dikemukakan oleh Hazan dan Rahat dalam melihat rekrutmen politik.

Pertama dari poin siapa kandidat yang dinominasikan, peneliti melihat partai PKN Kota Padang karena tergolong partai baru, partai ini berusaha untuk tetap mengikuti pemilihan legislatif sekalipun dengan kondisi minimnya antusias anggota mereka sendiri untuk dicalonkan, akibatnya tidak terdapat lagi kemurnian dalam pemilihan kandidat yang dinominasikan. Peneliti juga melihat bahwa adanya pandangan yang berbeda antar pengurus partai PKN Kota Padang dimana ada pengurus yang mengatakan bahwa mereka dicalonkan dengan sistem penunjukkan langsung sedangkan oleh pengurus yang lain tidak demikian. Dari sini peneliti menilai bahwa partai PKN Kota Padang tidak baik dalam memberikan calon atau kandidat dalam pendominasian pada pemilihan legislatif.

Kedua poin siapa yang menyeleksi, peneliti melihat pada poin ini tidak terlaksana dengan baik, karena memang tidak ada seleksi sedikit pun yang dilaksanakan oleh partai PKN. Kalaupun ada seleksi, seleksi yang dilaksanakan hanyalah seleksi administrasi untuk pemenuhan persyaratan sebagai calon legislatif yang diberikan oleh KPU, selebih dari pada itu, tidak ada seleksi dan tidak ada kaderisasi yang diberikan oleh partai PKN baik kepada kader maupun kader yang menjadi kandidat. Hal ini peneliti lihat dikarenakan kondisi partai PKN yang masih baru dan tergolong partai kecil, menambahkan proses seleksi ketat dan kaderisasi justru membuat partai ini makin tertinggal karena bagaimanapun sebuah partai tentunya membutuhkan massa yang besar untuk kelangsungan organisasi partai politiknya dan momen inilah yang masih terus diupayakan oleh partai PKN itu sendiri. Dari sini peneliti menilai bahwa partai PKN belum mampu melaksanakan kondisi ideal atau kondisi sebagaimana mestinya seleksi itu dilaksanakan.

Selanjutnya pada poin ketiga yaitu poin dimana kandidat diseleksi, pada poin ini peneliti melihat bahwa poin ini sudah terlaksana dengan baik, dimana partai tingkat pusat atau dalam hal ini Pimnas atau Pimpinan Nasional menyerahkan sepenuhnya kewenangan otonomi kepada partai tingkat daerah untuk menentukan nasibnya sendiri sepanjang tidak melanggar aturan yang ada. Partai ini telah memakai sistem desentralisasi pada partai tingkat daerah termasuk untuk melaksanakan rekrutmen politiknya masing-masing. Namun Pimnas dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya tanpa melakukan pengawasan kepada partai-partai tingkat daerah, apakah sudah melaksanakan rekrutmen dengan baik atau

tidak. Dari kondisi ini peneliti menilai bahwa dalam hal seleksi partai PKN kota padang sudah berada pada tahap sedang.

Selanjutnya pada poin terakhir yaitu bagaimana kandidat diputuskan, peneliti menilai poin ini tidak efektif atau tidak cocok disandingkan dengan partai PKN karena memang sedari awal partai ini tidak melaksanakan proses seleksi yang artinya bahwa kandidat diputuskan hanya berdasarkan penunjukan langsung yang kemudian bisa disimpulkan bahwa tidak ada poin pemutusan pada partai PKN Kota Padang. Seleksi tidak menjadi suatu penentu bagi kader maupun kandidat di partai PKN ini mengingat situasi dan kondisi partai yang masih sangat tergolong kecil yang sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat Kota Padang, dimana akhirnya partai PKN mencari sendiri kandidat yang bisa dicalonkan pada pemilihan legislatif sebagai perwakilan partai. Dari kondisi ini peneliti menilai bahwa poin bagaimana kandidat diputuskan tidak terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Dari keempat aspek teori rekrutmen politik yang dipaparkan oleh Hazan dan Rahat, peneliti melihat hanya satu dari empat poin yang dilaksanakan partai PKN dengan baik yaitu poin dimana kandidat diseleksi dimana partai PKN memakai prinsip desentralisasi. Prinsip ini merupakan pemberian otonomi penuh pada partai PKN tingkat daerah untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pusat. Partai PKN Kota Padang diberikan hak ini oleh partai PKN tingkat pusat untuk mengotot dirinya. Dan dari penjelasan peneliti di atas peneliti menyimpulkan bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai PKN Kota Padang tidak dilaksanakan dengan baik.

Kembali kepada pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, masalah rekrutmen politik yang dialami oleh partai PKN Kota Padang dikarenakan tidak terlaksananya proses kaderisasi di awal perekrutan calon kader dan tidak terlaksananya proses seleksi sesaat sebelum menjadi kandidat partai atau calon legislatif yang menyebabkan minimnya sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif tahun 2024 di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena keuangan partai PKN Kota Padang yang minim sehingga menyebabkan hal ini terjadi. Keuangan partai yang minim menjadikan partai sulit untuk bergerak seperti partai-partai lama yang sudah ada.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan serta merujuk pada penelitian mengenai Masalah Rekrutmen Politik Partai Kebangkitan Nusantara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Padang, maka peneliti memiliki saran kepada Partai Kebangkitan Nusantara secara terkhusus Partai Kebangkitan Nusantara Kota Padang untuk melaksanakan rekrutmen politik yang baik yang memberikan doktrinisasi ideologis kepada para kader partai agar kader juga memiliki kebanggaan dan kesetiaan kepada partai melalui sistem kaderisasi bagi setiap calon kader partai PKN Kota Padang. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti memberikan saran untuk membahas masalah rekrutmen politik Partai Kebangkitan Nusantara untuk tingkat yang lebih luas pada tingkat provinsi Sumatera Barat.